

HARIAN

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI KAMIS / 19 November 2020

HARIAN UNTUK UMUM  
TERBIT SENIN - JUMAT  
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com  
Redaksi 031-87854491  
Iklan 031-87854491  
Kantor Redaksi  
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26  
Surabaya

Semua manusia pasti  
ada kekurangan dan  
sudah tugas kita untuk  
saling mengisi

Abimana Arysatya, Aktor

## INSTRUKSI MENDAGRI ADA KERUMUNAN, KEPALA DAERAH TERANCAM DICOPOT



SCAN ME

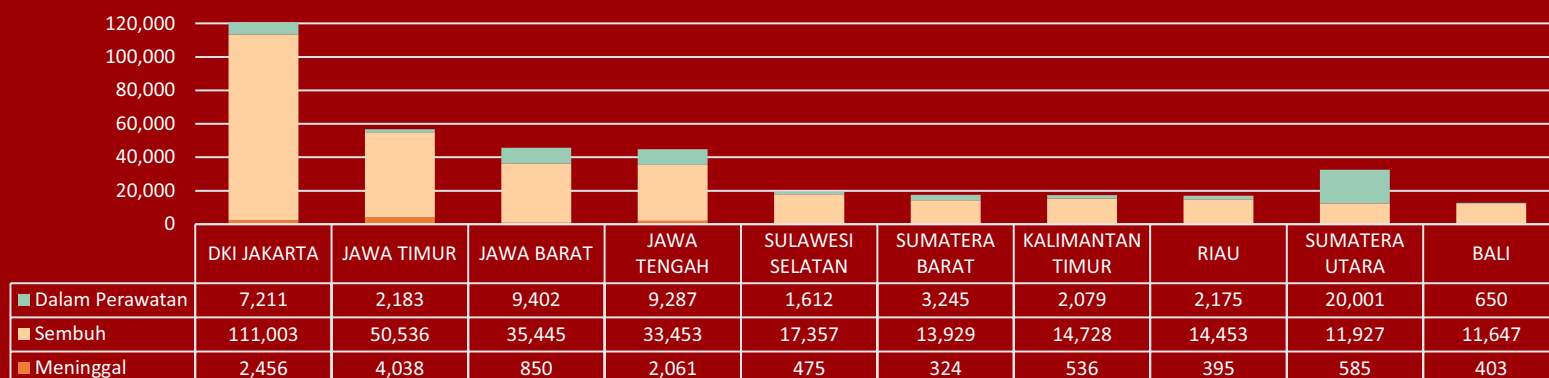
Gaduh hajatan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar protokol kesehatan berbuntut panjang. Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menerbitkan instruksi yang salah satu isinya adalah ancaman pencopotan bagi Kepala Daerah yang tak mampu

mengendalikan kerumunan. Indonesia memang masih darurat corona, setiap hari ada penambahan 3.000-4.000 kasus baru. Saat ini total infeksi sudah mencapai 478.720 pasien. Klaster liburan, klaster demo buruh dan terakhir klaster Petamburan bisa memicu 'ledakan' baru di negeri ini. Yuk! disiplin dimulai dari diri sendiri.

Baca Hal 11



### TOP 10 PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS CORONA TERBANYAK



# OPSI IBADAH HAJI 2021 : TETAP BERANGKAT-DIBATALKAN

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pemerintah Indonesia masih belum mendapat informasi soal penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 mendatang. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) telah mempersiapkan skema keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19.

"Sampai saat ini pemerintah RI belum menerima tanda adanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021," kata Fachrul dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Menag Fachrul mengungkapkan ada sebanyak 221.000 kuota jemaah yang seharusnya diberangkatkan haji tahun 2020. Jumlah tersebut terbagi untuk kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah.

"Berdasarkan hasil MoU penyelenggaraan ibadah haji 1441 H bahwa kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada RI sebanyak 221.000. Kuota tersebut dibagi jadi haji reguler 203.320 jemaah dan haji khusus 17.680 jemaah," jelasnya.

Meskipun Otoritas Kerajaan Arab Saudi masih belum mengeluarkan informasi soal pembukaan ibadah haji bagi Indonesia. Kemenag sudah mempersiapkan 3 opsi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan.

Opsi pertama, Menag Fachrul mengungkapkan sejumlah 221.000 akan diberangkatkan haji saat pandemi COVID-19 berakhir. "Pertama, jemaah diberangkatkan dengan kuota penuh sebesar 221.000 jika masa pandemi telah dinyatakan berakhir," ungkapnya.

Selanjutnya, Menag Fachrul menjelaskan opsi pemberangkatan jemaah dengan kuota yang terbatas. Ia mengatakan pemberangkatan haji nantinya akan tetap

mengikuti ketentuan yang diberlakukan Arab Saudi.

"Kedua, jemaah diberangkatkan dengan kuota terbatas sesuai pemberian Arab Saudi jika masa pandemi belum berakhir dan vaksin belum ada," ujar Fachrul. "Pembatasan kuota akan berdampak pada keberangkatan jemaah yang telah melakukan pelunasan BPIH tahun 2020, tidak semua dapat diberangkatkan, sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi," sambungnya.

Lebih lanjut, Menag Fachrul membuka opsi adanya pembatalan keberangkatan haji kepada jemaah haji. Khususnya, apabila Kerajaan Arab Saudi tidak membuka kuota haji untuk Indonesia. "Ketiga, jemaah batal diberangkatkan jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada pemerintah RI," ucapnya.

Menurut Menag Fachrul, konsep pemberangkatan jemaah haji tidak akan jauh berbeda dengan konsep pemberangkatan jemaah umroh. "Adapun konsep keberangkatan jemaah haji 2021 sama dengan pemberangkatan umroh pada masa pandemi Covid-19," tuturnya.

## Penutupan Umrah Hoax

Terkait kabar mengenai adanya kebijakan penutupan visa umrah untuk jemaah Indonesia oleh Kerajaan Arab Saudi, akibat temuan kasus Covid-19, Menag Fachrul Razi mengatakan itu hanya hoax. "Soal umrah ditutup, insyaallah sejauh ini hanya hoaks saja," katanya.

Fachrul memastikan gelombang II jemaah umrah Indonesia akan berangkat pada 22 November 2020 nanti. "Yang jelas insyaallah tanggal 22 November ini ada masuk gelombang kedua, akan berangkat



Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi

ya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyambut baik kabar tidak adanya larangan umrah bagi Indonesia. "Alhamdulillah," katanya.

Diketahui, belakangan beredar informasi adanya larangan jemaah umroh dari Indonesia. Pemberitaan penutupan visa umroh dari Arab Saudi disebut karena adanya 13 orang jemaah Indonesia terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi Endang Jumali mengatakan saat ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umrah di masa pandemi ini.

Mengutip VOA Indonesia, Rabu (18/11) Endang Jumali, Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi membenarkan mengenai adanya larangan sementara bagi Indonesia untuk mengirim jemaah umrah. "Sehingga larangan bagi jemaah dari Indonesia hanya bersifat sementara yang kemungkinan untuk evaluasi berbagai aspek, baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia," kata Endang. (ist)

## JEMAAH HAJI RI DI TENGAH PANDEMI



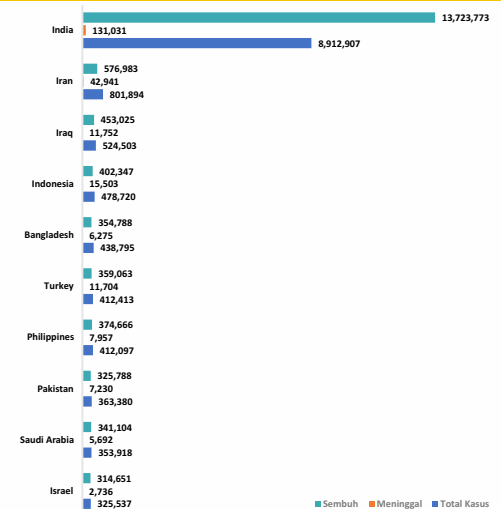
Jemaah tahun 2020 : **221.000**

- Jemaah Reguler 203.320 jemaah
- Jemaah Khusus 17.680 jemaah

3 opsi pelaksanaan ibadah haji 2021

- **Opsi pertama** : 221.000 akan diberangkatkan haji saat pandemi Covid-19 berakhir
- **Opsi kedua** : Pemberangkatan jemaah dengan kuota yang terbatas
- **Opsi ketiga** : Pembatalan keberangkatan bila Kerajaan Arab Saudi tidak membuka kuota haji untuk Indonesia

## TOP 10 NEGARA DENGAN KASUS CORONA TERBANYAK DI ASIA



## AKSES KE WISATA SIRAH KENCONG BLITAR DITUTUP PT. GREENFIELDS, WARGA WADUL DPRD

**B**LITAR - Belum tuntas masalah limbah yang mencemari sungai, sumur dan bau tidak sedap, PT. Greenfields Indonesia diprotes masyarakat lagi. Puluhan Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kab. Blitar wadul DPRD setempat karena jalan akses menuju Wisata Perkebunan Sirah Kencong ditutup oleh pabrik susu tersebut.

Warga yang tergabung Masyarakat Ngadirenggo Bersatu langsung diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito yang didampingi Ketua Komisi III, Sugianto dan Ketua Komisi I, M Sulistyono berikut anggota dari kedua komisi. Dalam hearing ini juga hadir pihak PT. Greenfields.

Mengawali hearing perwakilan warga Desa Ngadirenggo, Mariyono menyampaikan kekecewaan warga dengan adanya tindakan penutupan akses jalan menuju Wisata Perkebunan Sirah Kencong yang dilakukan oleh PT. Greenfields. Akses jalan dialihkan pada jalan yang menanjak dan sudah mengakibatkan lebih dari 10 kali kecelakaan. "Kami kecewa dengan penutupan akses jalan mudah menuju Wisata Sirah Kencong ini, padahal jalan tersebut sudah lama ada sebelum PT. Greenfields datang," ujar Mariyono.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Ngadirenggo, Rizki. Dia menuturkan masalah ini sampai sekarang tidak ada solusinya, sehingga dari sisi pariwisata juga sangat merugikan. "Karena sudah mulai banyak wisatawan yang berkunjung kembali ke Wisata Perkebunan Sirah Kencong," tuturnya.



Ketua DPRD Kabupaten Blitar, serta Ketua Komisi I dan III menerima warga Desa Ngadirenggo, Kec Wlingi, Kab Blitar

Selain itu keberadaan PT. Greenfields yang diharapkan memberikan imbas positif ke warga, jauh dari dibayangkan. Bahkan warga mengaku malah mendapat limbah dari kotoran sapi berupa pencemaran sungai, sumur dan bau tidak sedap. "Belum ada sinergitas dengan warga sekitar, termasuk sedikitnya jumlah tenaga kerja lokal yang diserap. Info yang kami dapatkan, pihak PT. Greenfields melibatkan pihak ketiga dan tidak mengutamakan kerjasama dengan desa-desa sekitar termasuk desa kami Ngadirenggo," tegas Riski.

Sementara itu pihak PT. Greenfields, melalui Sunarko menanggapi jika perusahaan memang menerapkan sistem Bio Security. Sebelum ada polemik ini pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan 6 Kades tidak hanya wilayah Wlingi tapi juga Doko. "Kita tetap mengizinkan masyarakat terutama warga setempat atau yang punya lahan

pertanian, bisa menggunakan melewati akses jalan tersebut. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang diterapkan perusahaan (Bio security) dan dikasih stiker, bukan untuk akses bagi masyarakat umum," ungkapnya saat hearing.

Sunarko juga mengaku sudah berdialog dengan warga setempat dan camat, serta menaikkan permukaan jalan agar tidak menanjak. Sedangkan terkait limbah dari PT. Greenfields juga sudah mulai berkurang, meski diakui untuk penanganan limbah membutuhkan waktu dan proses.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengaku telah menerima banyak aduan warga terkait dengan pencemaran limbah kotoran sapi sebelumnya. Dan hari ini keluhan masyarakat bertambah akibat penutupan jalan menuju Wisata Perkebunan Sirah Kencong.

"Permasalahan ini memang harus ada solusi segera, karena sesuai data BPN jalan yang ditutup termasuk jalan umum dan tidak masuk akses kawasan peternakan dalam HGU PT. Greenfields. Maka kami minta agar akses jalan tersebut segera dibuka, serta digunakan untuk umum atau masyarakat," kata Suwito.

Bahkan sesuai sejarah yang disampaikan warga Desa Ngadirejo, jalan tersebut sudah lebih dulu ada, jauh sebelum PT. Greenfields berdiri. "Kami minta semua bisa kompromi dan menerima, maka jalan tersebut harus dibuka kembali," tutup politisi PDIP ini. (ais)

## RATUSAN IZIN OPERASI MINIMARKET 'KEDALUWARSA', DPRD SURABAYA MINTA PEMKOT TEGAS

**S**URABAYA - DPRD Kota Surabaya menyayangkan keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait bisnis minimarket. Komisi B Bidang Keuangan dan Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya tegas terkait banyaknya izin minimarket yang sudah tidak berlaku lagi/habis masa berlakunya.

Sekretaris Komisi B, Mahfudz mengatakan, ada ratusan jaringan minimarket nasional yang sudah tidak berlaku izin operasionalnya. Namun kondisi ini dibiarkan dan seolah pemkot tutup mata dengan pelanggaran di depan mata itu.

"Saya mendengar ada lebih dari ratusan minimarket yang izinnya sudah expired. Seharusnya Alfamart dan Indomaret itu ditutup karena izinnya sudah habis. Kalau itu tidak ditutup, itu melanggar perda. Tanpa izin, kenapa dibiarkan?" tanya Mahfudz, Rabu (18/11).

Mahfudz menjelaskan, selama ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya memberikan dispensasi karena alasan pandemi Covid-19. Menurut Mahfudz, kebijakan pemberian dispensasi ini sudah lebih dari cukup, karena

dimulai sejak April 2020 sampai sekarang. Sehingga berjalan lebih dari 7 bulan.

"Tidak ada tindakan apa pun. Seharusnya ditutup, kalau memang disperdag tidak bisa menyampaikan ini kepada satpol PP, biar kami yang menyampaikan tidak apa-apa. Jangan tebang pilih," ujarnya.

Legislator dari Fraksi PKB ini merasa heran dengan sikap Pemkot Surabaya yang memberikan dispensasi kepada Alfamart dan Indomaret karena alasan pandemi. Tapi di sisi lain, hendak menarik retribusi pelaku usaha warung kopi (warkop). Kesannya, pemkot bukan melindungi rakyat kecil malah mencekik kalangan rakyat kecil dengan dalih pandemi.

"Warkop-warkop sudah mulai didata, mau ditarik retribusi, ini sudah ada laporan dari warkop-warkop. Pertanyaan saya, lah ini kenapa tidak ada alasan pandemi?" tanya Mahfudz

Ia menganggap, pelaku usaha warkop bukan perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan luas yang pantas ditarik retribusi. Apalagi di tengah pandemi, bukan hanya minimarket yang terdampak, warkop pun demikian. Menurutnya, harus ada



Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH. Thony

perlakuan yang sama terhadap itu semua.

"Kalau alasan pandemi sehingga ratusan Alfamart dan Indomaret izinnya yang sudah mati dibiarkan. Terus terbalik, ada warkop yang mulai didata dan akan ditarik retribusi, inikan lucu. Yang besar dibiarkan, yang kecil diusik," pungkasnya. (Ard).

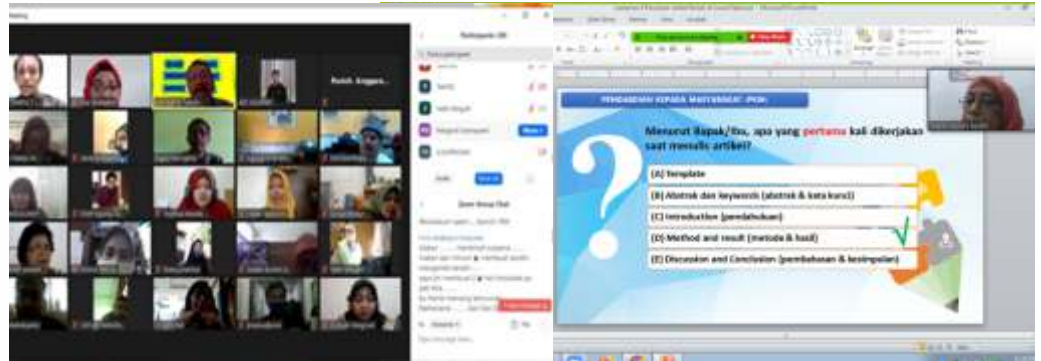
## UNESA GELAR PKM PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI GURU SMK

Surabaya-Universitas Negeri Surabaya (Unesa) terus melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kini giliran melalui Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) menggelar pelatihan karya ilmiah bagi guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pelatihan karya ilmiah Bagi guru teknologi konstruksi dan poperti ini diikuti oleh SMK Negeri (SMKN) yang berada di Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro dan Tuban.

"Melalui pelatihan karya ilmiah bagi guru-guru SMK harapannya para guru tambah profesional untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam menulis karya ilmiah berupa penelitian tindakan kelas maupun artikel," ujar perwakilan tim Teknik Sipil FT Unesa, Indiah. Secara lengkap, dalam tim ada E. Titiek Winanti, Didiek Purwadi, Ninik Wahyu H dan Wahyu Dwi M.

Selain itu, tujuan diadakannya pelatihan tersebut guna meningkatkan belajar siswa agar mencapai hasil di atas ketuntasan yang ditetapkan dan berkompotensi. Peserta pelatihan sendiri ada 28 guru dari 8 SMKN.



Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, melalui WhatsApp, Zoom dan Google meet.

Materi pelatihan terdiri dari pengetahuan mengenai jenis penelitian, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), analisa data, artikel, template, dan tugas membuat pra-proposal.

Pelaksanaan berlangsung sukses dan peserta pertemuan berkipas aktif hingga terkumpul 8 pra-proposal dari peserta 8 SMKN. Hasil analisa pemahaman PTK, pe-

serta yang menjawab nilai di atas dan sama dengan 60, sebanyak 62% peserta.

Sementara hasil kemampuan peserta terhadap pemahaman karya ilmiah mengalami kenaikan 48%. Sementara sekitar 17% yang belum paham. "Belum paham, dimungkinkan masalah jaringan internet, tidak bisa tatap muka secara langsung atau masih belum menjadi tenaga tetap di SMK. Jadi secara umum pelatihan ini sudah sesuai harapan yang diinginkan," tutupnya. (adv)

## BPOM PASTIKAN VAKSINASI CORONA MUNDUR LAGI

Jakarta- Hasil survei terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut tiga perempat warga Indonesia telah mendengar tentang vaksin Covid-19. Lalu dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19.

Sayangnya semangat menggebu itu harus direm dulu karena Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan rencana vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021.

Hal ini lantaran emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini. "Kami sudah sampaikan pada pemerintah, bapak presiden, dan bapak menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020," ujar Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Kata Penny, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinik vaksin covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term. Penny memastikan apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin EUA dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021.

"Sehingga kita mundur kembali ke rencana awal EUA diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 dengan data-data. Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa memberikan di minggu ketiga Januari 2021,"

jelasnya.

Di sisi lain, Penny juga memberikan opsi apabila vaksin covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember ini. Menurutnya, penyuntikan vaksin covid-19 dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu.

"Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu," beber Penny.

Sebelumnya berbagai jenis vaksin yang diproduksi sejumlah negara diklaim siap didatangkan ke Indonesia yakni Cansino, G42 atau Sinopharm, hingga Sinovac. Di antara beberapa kandidat vaksin yang dibeli di Indonesia, Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis fase akhir di beberapa negara termasuk Brasil dan Cina.

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech berhasil memicu respons kekebalan tubuh dengan cepat. Ini merupakan data uji klinis yang dipublikasikan perusahaan, Rabu (18/11). Tingkat antibodi yang dihasilkan vaksin bernama CoronaVac ini lebih rendah daripada orang yang telah pulih dari virus corona baru tetapi para peneliti mengungkapkan hal itu cukup memberikan perlindungan yang cukup bagi pengguna.

Sedangkan Sinopharm sudah menyelesaikan



Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

kan uji klinis tahap akhir di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Adapun CanSino sudah menyelesaikan uji klinis tahap akhir di Kanada, Cina, dan Arab Saudi.

Terpisah, Presiden Jokowi meninjau simulasi vaksinasi corona di Puskesmas Tanah Sareal Harapan Keluarga, Kota Bogor, Jawa Barat. Ia didampingi Menkes Terawan Agus Putranto.

"Saya datang ke puskesmas di kota Bogor, puskesmas Tanah Sareal karena kemarin saya mendengar bahwa di puskesmas diadakan simulasi untuk vaksinasi. Dan karena memang saya tinggal di sini sehingga saya mampir," kata Jokowi di Puskesmas, Rabu (18/11).

"Pertama mengenai vaksin terlebih dahulu kita berharap vaksin ini datang di akhir November ini, kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa ya berarti bulan Desember," ungkapnya. "Baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah Bio Farma," imbuh dia. (ist)

## 380 IKLAN KAMPANYE DIDUGA MELANGGAR, 182 KONTEN SUDAH TAKE DOWN

Jakarta - Bawaslu memeriksa sebanyak 380 konten internet yang diduga berpotensi melanggar ketentuan undang-undang. Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu melakukan take down terhadap 182 konten internet yang diduga melanggar iklan kampanye dan menyebarkan hoax.

"Kami dari Bawaslu menyampaikan terima kasih atas kerja sama diberikan pada kami dan juga kepercayaan melaporkan pelanggaran internet. Kami telah memeriksa 380 pelanggaran konten internet yang ada, dari itu ada 182 atau lebih dari setengahnya kita minta untuk di-take down baik untuk pelanggaran pemilihan, UU ITE dan KUHP," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dalam konferensi pers yang ditayangkan di Komininfo Tv, Rabu (18/11).

Adapun rincian dari 182 konten yang di-take down sebanyak 77 URL diduga melanggar UU terkait Pilkada dan UU ITE. Serta sebanyak 105 konten diduga melanggar iklan kampanye di luar jadwal.

Fritz mengatakan Bawaslu dan Komininfo hingga tanggal 18 November menemukan 38 isu hoax yang didapatkan dari konten internet. Adapun isu hoax tersebut terkait penundaan Pilkada dan disinformasi lainnya.

Selain itu Bawaslu juga menerima laporan dari Komininfo sebanyak 217 URL atau tautan. Fritz menyebut sebanyak 65 URL dilaporkan melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, yaitu terkait larangan kampanye, 10 tautan melanggar Pasal 62 PKPU 13 tahun 2020, dan ada 2 URL yang melanggar Pasal 28 UU ITE yaitu menyampaikan berita bohong atau disinformasi. Hasilnya terdapat 77 URL yang diduga melanggar.

Selanjutnya ada 9 laporan yang masuk ke situs Bawaslu, dari laporan tersebut ditemukan satu laporan diduga melanggar

Pasal 62 PKPU 13 tahun 2020. Selanjutnya Bawaslu juga menemukan 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui Form A Online dari pengawas pemilu.

Selain itu Bawaslu juga mengawasi iklan kampanye di Facebook yang melanggar jadwal kampanye. Fritz menyebut iklan dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi berdasarkan pengamatan Bawaslu sampai hari ini telah ada iklan kampanye aktif yang telah dapat kita telusuri melalui add library facebook.

Bawaslu menemukan ada 49 iklan kampanye aktif per tanggal 21 Oktober, ada 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, ada 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan ada 24 iklan kampanye aktif per 13 november. Secara total sampai hari ini ada 105 total iklan kampanye yang aktif selama kampanye. "Itu kegiatan yang bertentangan dengan PKPU 13 nomor 2020 terkait dengan jadwal pelaksanaannya kampanye," ungkap-nya.

Fritz menambahkan Bawaslu juga menerima laporan melalui typeform dari pengawas pemilu. Hasilnya ada 10 laporan masuk, terbagi 5 laporan terkait pelanggaran kampanye, 4 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1 laporan terkait disinformasi.

Sementara itu, Jubir Komininfo Dedy Permadi mengatakan khusus konten hoax Komininfo dan Bawaslu menemukan 38 isu hoax terkait Pilkada. Dari 38 isu tersebut ter-dapat 77 konten yang melanggar peraturan.

"Seperti yang disampaikan Pak Fritz, bahwa Kemenkominfo dari 1 September sampai dengan 18 November 2020 telah menemukan 38 isu hoax terakit dengan Pilkada 2020. 38 isu tersebut tersebar



Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar

### TEMUAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE OLEH BAWASLU

- 380 konten internet yang diduga berpotensi melanggar ketentuan undang-undang
- 182 konten internet di take down karena melanggar iklan kampanye dan menyebarkan hoax.
- Rinciannya 77 URL diduga melanggar UU terkait Pilkada dan UU ITE dan 105 konten diduga melanggar iklan kampanye di luar jadwal. Ditemukan 38 isu hoax dari konten internet



sebanyak 217, Bawaslu telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku. Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindak lanjuti dan 13 konten yang sudah dilakukan take down," ujar Dedy.

"Untuk masyarakat yang merasa ada masalah atau pun menemukan konten dengan muatan negatif internet terkait dengan Pilkada dapat menyampaikan aduan kepada Bawaslu maupun kepada Komininfo, diantaranya melalui website aduankonten.id atau melalui email aduankonten@gmail.com atau melalui nomor WA 08119224545 atau melalui Bawaslu," sambungnya. (ist)

## DENAH TPS PILKADA 2020 BEDA, ADA BILIK KHUSUS PEMILIH YANG 'DEMAM'

Jakarta- Pilkada 2020 tinggal menghitung hari, tepatnya akan digelar 21 hari lagi yaitu pada 9 Desember 2020. Di pilkada kali ini, ada sejumlah perubahan di TPS untuk menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Salah satunya adalah mempersiapkan bilik suara khusus untuk pemilih yang bersuhu tubuh tinggi alias demam.

Di hari pemilihan nanti, sebelum masuk ke TPS, para pemilih juga harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu di luar TPS. Antrean pemilih juga dibatasi masing-masing berjarak minimal 1 meter.

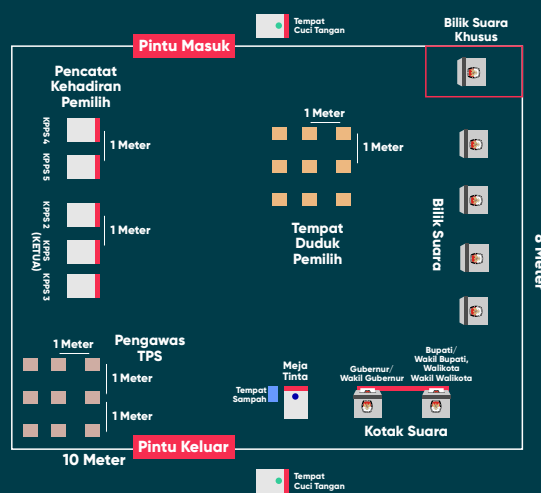
"Untuk satu TPS kali ini juga dibatasi, maksimal adalah 500 pemilih. Lalu ada penggunaan sarung tangan, pemeriksaan suhu badan, dan penyediaan masker," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Komisi II DPR, Rabu (18/11).

Pemilih juga akan dicek suhunya sebelum

masuk TPS. Jika suhu badan pemilih di bawah 37,5 derajat Celcius, pemilih yang sudah absen bisa langsung mengantre di tempat duduk pemilih yang sudah disiapkan.

Sedangkan bagi pemilih dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, akan langsung diarahkan ke bilik suara khusus yang ada di luar TPS. Posisinya sejajar dengan bilik di dalam TPS seperti tampak pada foto. Untuk pemilih yang menyalurkan hak suaranya di bilik biasa, setelah menerima surat suara dan memilih calonnya di bilik suara, mereka akan diarahkan ke kotak suara. Setelah itu, mereka akan mencelupkan jari di meja tinta yang berada di dekat pintu keluar. Bagi pemilih di bilik khusus pemilih bersuhu 37,3 derajat Celcius, tinta akan ditetaskan ke jari.

Begitu keluar, pemilih diminta untuk mencuci tangan dengan sabun lagi di tempat yang suda disediakan. Tempat cuci tangan itu, tepat berada di depan pintu keluar. (Ist)



### DENAH TPS

- Panjang TPS : 10 m
- Lebar TPS : 8 m
- Tinggi Meja Bilik Dari Lantai : 75 - 100 cm
- Tinggi Meja Bilik Dari Lantai : 35 cm



A portrait of Dietmar Hoepfner, an older man with grey hair, wearing a grey suit jacket over a white shirt. He is wearing a blue Schalke 04 scarf with white text that reads 'SALKE 04' and '1899'. The background is a blurred stadium filled with spectators.

*Dietmar Hoepfner*

**SANG INSINYUR  
PENYUKA SEPAK BOLA**

Pengusaha dan insinyur perangkat lunak Jerman, Dietmar Hopp merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Ia adalah salah satu pendiri SAP SE, sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional Jerman yang membuat perangkat lunak untuk perusahaan guna mengelola operasi bisnis dan hubungan pelanggan.

Berdasarkan data Forbes Real Time Net Worth, harta kekayaan Hopp hari ini mencapai 15,2 miliar dolar Amerika (Rp213 triliun) berkat saham yang ia miliki di SAP SE (kini SAP AG).

Perusahaan ini terkenal dengan perangkat lunak ERP-nya. Karena itulah SAP AG menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar di Eropa (dan non-Amerika) berdasarkan pendapatan, dan merupakan perusahaan perangkat lunak publik terbesar ketiga di dunia.

Tak sendiri, Dietmar Hopp mendirikan SAP SE pada tahun 1972 bersama Hans Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira, dan Claus Wellenreuther yang merupakan rekan-rekannya saat ia masih bekerja di IBM (International Business Machines) Amerika.

Pria kelahiran 26 April 1940 ini menyelesaikan gelarnya dari Universitas

Karlsruhe di Magister Sains. Saat masih bekerja di IBM, Hopp bekerja sebagai pengembang perangkat lunak.

Pada bulan Juni 1972, Hopp dan empat rekannya mendirikan perusahaan SAP Systemanalyse und Programmentwicklung (Analisis Sistem dan Pengembangan Program/SAPD), sebagai kemitraan swasta di bawah KUH Perdata Jerman. Kehadirannya telah merevolusi sistem penyimpanan Jerman hingga hari ini.

Klien pertama mereka adalah Imperial Chemical Industries cabang Jerman di Östringen, tempat mereka mengembangkan program mainframe untuk penggajian dan akuntansi. Alih-alih menyimpan data pada kartu berlubang secara mekanis, mereka menyimpannya secara lokal di Sistem Elektronik saat menggunakan basis data logika umum untuk semua aktivitas Organisasi.

Oleh karena itu, Hopp dan rekannya menyebut perangkat lunak mereka sistem waktu real-time, karena tidak perlu memproses kartu berlubang semalaman. Karena alasan inilah produk andalan mereka menggunakan nama R hingga akhir 1990-an.

Versi pertama ini juga merupakan perangkat lunak mandiri yang dapat



ditawarkan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Pada pertengahan 1990-an, SAP mengikuti tren dari komputasi mainframe ke arsitektur klien-server. Pengembangan strategi internet SAP dengan mySAP.com mendesain ulang konsep proses bisnis yang terintegrasi melalui internet.

Hopp adalah CEO SAP AG dari tahun 1988 sampai 1998, ia juga menjadi ketua dewan pengawas dari tahun 1998 sampai 2003, dan anggota dewan dari tahun 2003 sampai 2005. Hopp memiliki sekitar 10% saham perusahaan setelah keluar dari dewan.

Pada tahun 2006, Hopp mentransfer 70 persen kekayaannya ke yayasan amal, Dietmar Stiftung, menciptakan salah satu yayasan terbesar di Eropa. Yayasan ini mendukung program pendidikan, olahraga, kedokteran, dan sosial.

Hopp adalah seorang yang gemar dengan sepak bola. Ia pun menjadi Kepala Pendukung Keuangan klub sepak bola Jerman TSG 1899 Hoffenheim.

Ketika Hopp mulai mendukung klub sepak bola Jerman TSG 1899 Hoffenheim pada tahun 2000, Hoffenheim pun bermain di divisi kelima sepak bola Jerman. Klub sepak bola itu adalah tempat ia bermain saat remaja (Ist).

Foto : arwin neil baichoo/unsplash



## PENELITI: MADU BISA **ATASI PILEK** LEBIH BAIK DARI OBAT

**P**eneliti dari Oxford University menemukan, madu dapat membantu meredakan gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) lebih baik daripada beberapa obat flu dan antibiotik, terutama karena sebagian besar infeksi ini karena virus sehingga tidak dapat diobati oleh antibiotik.

Para peneliti Oxford mengamati 14 studi yang membandingkan penggunaan madu dengan antibiotik; Produk Over the Counter Market (OTC) seperti antihistamin, penekan batuk, ekspektoran (produk yang membantu membersihkan lendir); dan plasebo.

Setelah membandingkan studi dan temuan, para peneliti menemukan, madu memang membantu meredakan gejala lebih baik daripada produk OTC dan antibiotik.

Menurut dua studi, gejala sakit pada orang yang menggunakan madu lebih sedikit daripada yang lain.

"Kami menemukan madu kemungkinan besar memperbaiki gejala ISPA, dengan bukti terkuat dalam konteks frekuensi batuk dan tingkat keparahan batuk. Bukti moderat mendukung penggunaannya daripada perawatan biasa untuk gejala ISPA lainnya, dan sebagian besar bukti berasal dari penelitian pada anak-anak," kata peneliti seperti dikutip dari Medical Daily, beberapa waktu

lalu.

Mereka mengatakan, madu lebih efektif dan tidak terlalu berbahaya dibandingkan perawatan alternatif biasa dan menghindari kerusakan melalui resistensi antimikroba.

Meskipun demikian, anak-anak di bawah usia 1 tahun sebaiknya tidak mengonsumsi madu karena berisiko terkena botulisme.

Anak yang berusia di atas setahun biasanya dapat mengonsumsi madu dengan aman karena sistem pencernaannya telah matang. Jika ragu, bicarakan hal ini dengan dokter Anda.

Pilek dan ISPA yang mempengaruhi sinus, hidung, laring, dan faring dapat membuat Anda merasa lelah, dengan gejala

seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, batuk, dan hidung tersumbat.

Untuk melewati hari atau tidur sepanjang malam, beberapa orang meminta antibiotik dari dokter mereka atau obat flu dan alergi yang dijual bebas.

Meskipun produk obat OTC sudah tersedia, namun bisa berbahaya bagi sebagian orang. Dekongestan misalnya, dapat menyebabkan efek samping yang serius, seperti tekanan darah tinggi, kecemasan dan detak jantung tidak teratur.

"Dekongestan tidak boleh digunakan pasien yang secara bersamaan menggunakan inhibitor oksidase monoamine (sejenis antidepresan); kombinasi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang mengancam jiwa," kata para apoteker.

Obat batuk memiliki peringatannya sendiri. Jika diminum terlalu sering atau dalam dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan, obat ini dapat menyebabkan halusinasi, tekanan darah tinggi, dan kejang. Ekspektoran, di sisi lain, memiliki lebih sedikit efek samping.

Antibiotik tidak berguna untuk mengobati infeksi virus seperti pilek dan sebagian besar ISPA. Zat ini tidak akan mengurangi gejala dan menggunakannya dalam situasi ini dapat menyebabkan resistensi antibiotik (Ant).

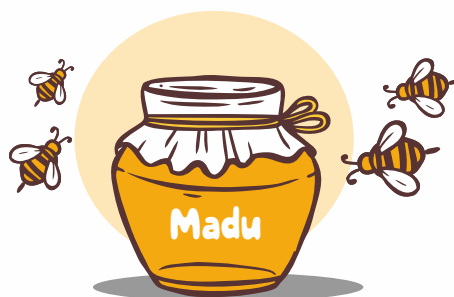






Foto : Istimewa

**Z**oom mengumumkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menjeda rapat untuk sementara sehingga pengguna dapat mengeluarkan "Zoombombers" atau individu yang mengganggu dari ruang meeting virtual.

"Zoom merilis dua fitur keamanan baru akhir pekan ini untuk menghapus dan melaporkan peserta rapat yang mengganggu. Kami juga ingin berbagi informasi tentang alat internal yang kami gunakan untuk membantu mencegah gangguan rapat sebelum terjadi," ujar Security & Privacy PR Lead, Matt Nagel, dalam unggahan di blog resmi Zoom (Senin, 16/11/2020).

Saat penggunaan Zoom meroket selama pandemi, sejumlah serangan muncul di platform konferensi video itu dengan menampilkan video mengejutkan dan konten mengganggu, yang kemudian dikenal sebagai "Zoombombing."

Dengan fitur keamanan baru Zoom,

pengguna kini dapat menghentikan sementara rapat untuk memblokir konten buruk, dan juga melaporkan Zoombomber ke Zoom.

Saat ini, host dan co-host dapat menjeda rapat dengan mengklik ikon Keamanan, lalu klik opsi tangguhkan aktivitas peserta. Setelah diaktifkan, semua video, audio, obrolan dalam rapat, anotasi, berbagi layar dan rekaman akan berhenti.

Selanjutnya, Zoom akan bertanya pada host dan co-host apakah mereka ingin melaporkan pengguna, jika mereka ingin melakukannya, pengguna yang dilaporkan akan dihapus dari rapat mereka.

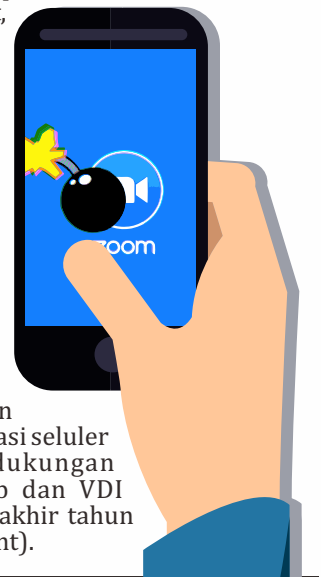
Setelah itu penyelenggara rapat dapat melanjutkan pertemuan dan mengaktifkan kembali fitur yang ingin mereka gunakan.

Zoom juga akan mengirim email kepada para penyelenggara rapat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Fitur baru ini diaktifkan secara default untuk semua peng-

guna Zoom gratis maupun berbayar.

Tidak hanya penyelenggara rapat, yang dapat melaporkan Zoombombers, kini peserta rapat juga dapat melaporkan pengguna yang mengganggu dengan mengeklikencana Keamanan di kiri atas.

Kedua fitur baru ini tersedia di desktop Zoom untuk Mac, PC dan Linux, serta aplikasi seluler kami, dengan dukungan untuk klien web dan VDI yang akan hadir akhir tahun ini," ujar Nagel (Ant).



# DIGANDRUNGI DI KOREA, APA MANFAAT SOOTHING GEL ?



Foto : Istimewa

**S**oothing gel jadi salah satu skincare Korea yang digandrungi kaum hawa. Keuntungan semakin populernya skincare Korea salah satunya kita jadi mengenal yang namanya soothing gel. Skincare yang satu ini bisa dibilang anugerah karena bisa mengatasi berbagai masalah kulit. Soothing gel juga serbaguna karena dapat dimanfaatkan sebagai pelembap, masker, bisa meredakan kulit terbakar dan razor burn. Awalnya yang kita tahu, soothing gel hanya terbuat dari aloe vera saja tapi semakin ke sini muncul berbagai macam jenis soothing gel dari mulai bambu, lotus, mentimun, dll. Perlu diketahui pada umumnya soothing gel mengandung 92% ekstrak buah delima dan 9 jenis herbal, seperti Chamomile, Rosemary, Lavender, Bergamot, Basil, Sage, Oregano, Spearmint, dan Lemon Balm. Kandungan ekstrak buah dan herbal ini melembapkan kulit, menenangkan kulit akibat paparan sinar matahari. Dilansir dari Shining Nature Purity, ada sederet manfaat soothing gel yang perlu kamu tahu.

## MELEMBAPKAN WAJAH

Soothing gel bisa digunakan sebagai gel wajah. Pastikan wajah sudah dicuci bersih terlebih dahulu, lalu aplikasikan soothing gel ke wajah.

## MENJAGA KELEMBAPAN KULIT

Kamu bisa mengoleskan ke bagian tubuh yang terasa kering untuk meningkatkan kelembapan. Misalnya di area siku, lipatan kaki, tumit dan sebagainya. Uniknya, soothing gel juga aman digunakan untuk si kecil.

## ESSENCE RAMBUT

Siapa sangka soothing gel sangatlah multifungsi, seperti dapat dimanfaatkan sebagai essence rambut. Caranya, balurkan intensive soothing gel ke seluruh rambut, diamkan selama 30 menit, lalu bilas dengan sampo.

## GEL PENCUKUR

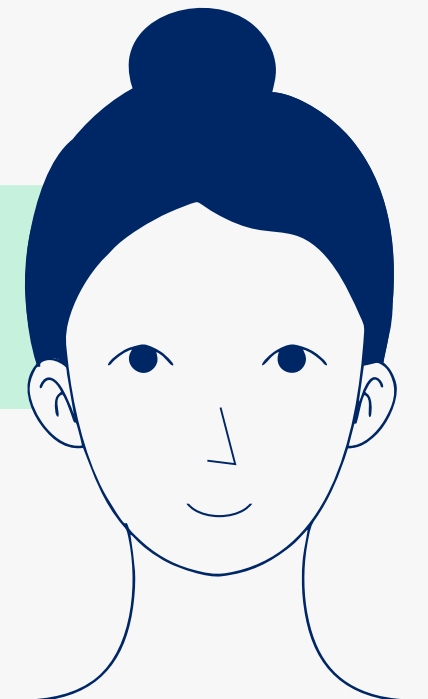
Bagi kaum pria, soothing gel ini bisa diaplikasikan ke wajah setelah mencukur loh. Tentu dengan bantuan gel ajaib ini bisa membuat kulit lebih sehat.

## MENGOBATI LUKA BAKAR

Aloe vera memiliki kandungan air yang tinggi, oleh karena itu aloe vera soothing gel mampu mendinginkan serta menenangkan kondisi kulit yang terbakar. Serta mencegah infeksi karena luka pada kulit akibat terbakar.

## MENYEMBUHKAN JERAWAT

Aloe vera punya kandungan Auxin dan Orbbrekins yang mampu meregenerasi sel hormon pada kulit sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan jerawat, serta mampu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, jadi dapat menyamakan bekas jerawat. (ist)



## Instruksi Mendagri (dari hal 1)

Berbagai kegiatan masyarakat secara besar-besaran tanpa dibarengi disiplin protokol kesehatan bak menjadi 'bom waktu' yang siap meledak kapan saja. Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian pun Tito menyampaikan respons ihwal kerumunan besar massa akhir-akhir di beberapa daerah.

"Hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes (protokol kesehatan). Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," katanya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito.

Ia lantas meminta kepada seluruh kepala daerah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sebab, apabila ada ketentuan yang dilanggar, maka sanksinya bisa berujung pada pemecatan.

"Kalau kita lihat UU No 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang apa peraturan perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," ujar Tito.

"Yang dimaksud PSBB adalah mencegah kerumunan masyarakat berskala besar. Oleh karena itu, karena ini sudah diatur dalam satu set peraturan perundang-undangan, saya instruksikan ke gubernur dan wali kota untuk menegakkan secara konsisten prokes guna mencegah penyebaran Covid-19," lanjutnya.

Tito pun meminta agar kepala daerah proaktif, tidak hanya responsif-reaktif, dalam merespons kerumunan massa. Sebab, mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan itu, disebut Tito, termasuk membubarkan kerumunan massa, termasuk tidak mengikuti kerumunan massa. Dia meminta kepala daerah memberikan contoh kepada masyarakat.

"Mencegah dapat dilakukan secara humanis termasuk dengan membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur. Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi prokes, termasuk tidak ikut dam kerumunan yang berpotensi melanggar prokes," kata Tito.

Seperti diketahui, kerumunan besar terjadi baru-baru ini di Petamburan, DKI Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat karena kegiatan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Rizieq tiba di Indonesia pada Selasa, 10 November lalu setelah 3,5

tahun bermukim di Mekah, Arab Saudi.

Rabu, 11 November, beredar foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke rumah Rizieq. Lalu pada Senin, 16 November, Presiden Joko Widodo meminta Mendagri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang dianggap tidak menegakkan protokol kesehatan dengan tegas di daerahnya.

Setelah memeriksa Gubernur Anies, Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Jawa Barat dan Polres Bogor memeriksa para saksi lagi. "Ada 10 orang yang dipanggil untuk klarifikasi," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Rabu (18/11).

Para saksi yakni Kepala Desa Sukagalih, Ketua RW 03, Camat Megamendung, Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Habib Muhsin dari Front Pembela Islam (FPI), Kepala Desa Kuta, Ketua RT 01, Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor, dan pihak Bhabinakamtibmas. Mereka akan diminta keterangan pada Jumat (20/11) di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Kata Argo, bisa saja nantinya penyidik akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Kalau memang penyidik membutuhkan kegiatan yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan akan klarifikasi Gubernur Jawa Barat," terang Argo.

Akibat peristiwa ini Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya. Nasib serupa dialami Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi. Mutasi itu karena keduanya dianggap gagal menegakkan protokol kesehatan di wilayah

hukumnya. Pencopotan itu berdasar Surat Telegram Nomor: 3222/XI/KEP./2020 bertanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah melayangkan teguran kepada 83 kepala daerah yang membiarkan terjadinya kerumunan. Bahkan di dalamnya, ada kepala daerah yang ikut serta dalam kerumunan tersebut.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran 4-6 September Kemendagri telah beri teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan itu 83 sudah diberikan teguran secara tertulis," kata Tito.

Tito mengungkapkan, kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan antara lain 1 gubernur, 39 bupati, 5 wali kota, 31 wakil bupati, dan 7 wakil wali kota. Mantan kapolri ini menjelaskan, Kemendagri tak hanya memberikan teguran bagi para pelanggar. Namun, selain memberikan teguran, juga mengapresiasi kepala daerah yang di wilayahnya patuh terhadap protokol kesehatan. Sekitar delapan kepala daerah yang mematuhi protokol kesehatan saat masa pilkada serentak 2020, sehingga diberikan apresiasi oleh Kemendagri.

"Delapan kepala daerah itu terdiri dari gubernur Gorontalo, gubernur Sulawesi Barat, bupati Gorontalo, bupati Luwu Utara, bupati Banggai, wakil bupati Banggai, dan wakil wali kota Ternate," tutupnya. (ist,ins)

## PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 UNTUK SAMBUT NEW NORMAL

### JAGA KEBERSIHAN TANGAN

Bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Cara mencuci tangan pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari

### JANGAN MENYENTUH WAJAH

Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut

### TERAPKAN ETIKA BATUK DAN BERSIN

Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk atau bersin. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah

### PAKAI MASKER

Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ke mana pun saat anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis, karena masker

medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan

### JAGA JARAK

Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah Physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang

### ISOLASI MANDIRI

Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah

### JAGA KESEHATAN

Pastikan Kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan olahraga ringan, dan istirahat yang cukup

# STRUKTUR KPK DINILAI 'OBESITAS'

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai 'obesitas' pasca menambah sejumlah posisi dalam strukturnya. Langkah komisi anti-rasuah itupun dinilai bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, Rabu (18/11).

Kurnia mengatakan bahwa Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal itu tentu mengartikan bahwa bidang-bidang yang ada di KPK seharusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan

Masyarakat.

"Namun yang tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," ujar Kurnia.

ICW menilai produk hukum internal KPK ini sangat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di (Mahkamah Agung). Belum apa-apa, ICW juga mempertanyakan efektivitas struktur baru KPK. "Mestinya saat ini KPK memfokuskan pada perbaikan kinerjanya sendiri, ketimbang merombak susunan internal yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan efektivitasnya juga dipertanyakan," katanya.

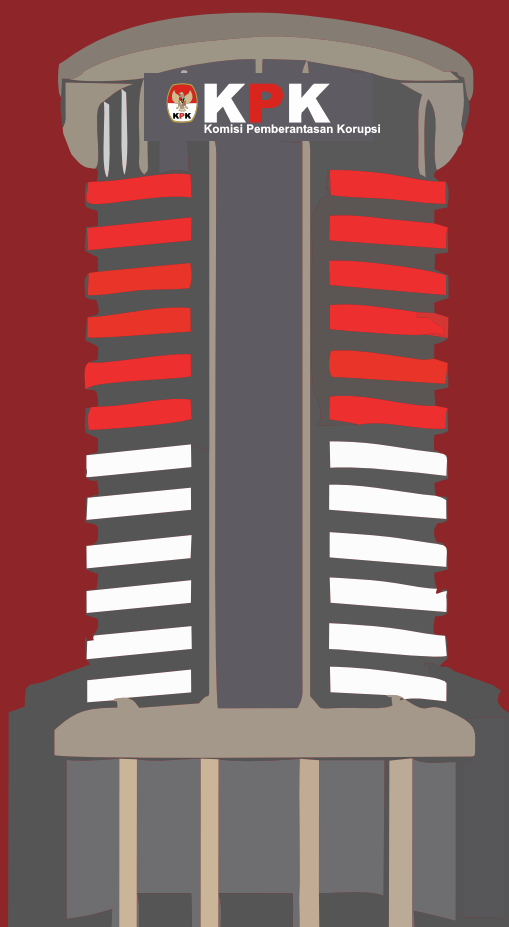
Seperti diketahui, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom)

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan struktur sebuah organisasi akan disesuaikan dengan strategi yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut. Begitu juga KPK saat ini. "Struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan, KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode yaitu Penindakan, Pencegahan dan Pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal. Melainkan, kata dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik yang perlu penanganan komprehensif. "Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," ujar Ghufron. (ist)

## BEDA PERKOM KPK DAN UU KPK



Perkom Nomor 7 Tahun 2020, struktur KPK tertuang pada Pasal 6 yang bunyinya sebagai berikut:

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
  1. Biro Keuangan;
  2. Biro Sumber Daya Manusia;
  3. Biro Hukum;
  4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
  5. Biro Umum.
- b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
  1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
  2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
  3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
  4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
  5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
- c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
  1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
  3. Direktorat Monitoring;
  4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
  5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri

atas:

1. Direktorat Penyelidikan;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
- e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.
- f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
  1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
  2. Direktorat Manajemen Informasi;
  3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
  4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
  5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
- g. Staf Khusus;
- h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
- i. Inspektoral;
- j. Juru Bicara; dan
- k. Sekretariat Pimpinan.

Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
  - a. Bidang Pencegahan;
  - b. Bidang Penindakan;
  - c. Bidang Informasi dan Data; dan
  - d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan:
  - a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. Subbidang Gratifikasi;
  - c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
  - d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:
  - a. Subbidang Penyelidikan;
  - b. Subbidang Penyidikan; dan
  - c. Subbidang Penuntutan.
- (5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
  - a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
    - Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
    - Subbidang Monitor.
- (6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
  - a. Subbidang Pengawasan Internal;
    1. Subbidang Pengaduan Masyarakat.
- (7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.
  1. Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.